



PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA (REALITAS, TANTANGAN, DAN HARAPAN)

Agus Sutono

POLITIK MENURUT FOUCAULT DALAM "THE ARCHAEOLOGY OF KNOWLEDGE" DAN RELEVANSINYA BAGI MULTIKULTURALISME INDONESIA

Agustinus Wisnu Dewantara

DAMPAK DAN PENGARUH MEDIA KOMUNIKASI SOSIAL SERTA TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK

Dominikus I Gusti Bagus Kusumawanta

PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI MANUSIA UNTUK MENGHARGAI PLURALITAS

Ola Rongan Wilhelmus

GLOBALISASI DAN MEDIA KOMUNIKASI SOSIAL: TANTANGAN BAGI PENDIDIKAN ANAK

Don Bosco Karnan Ardijanto

WAJAH KERAHIMAN ALLAH DALAM PERJANJIAN LAMA

Agustinus Supriyadi

JPAK

JURNAL PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) adalah media komunikasi ilmiah yang dimaksudkan untuk mewadahi hasil penelitian, hasil studi, atau kajian ilmiah yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Katolik sebagai salah satu bentuk sumbangan STKIP Widya Yuwana Madiun bagi pengembangan Pendidikan Agama Katolik pada umumnya.

Penasihat

Ketua Yayasan Widya Yuwana Madiun

Pelindung

Ketua STKIP Widya Yuwana Madiun

Penyelenggara

Lembaga Penelitian STKIP Widya Yuwana Madiun

Ketua Penyunting

Agustinus Wisnu Dewantara

Penyunting Pelaksana

Don Bosco Karnan Ardijanto
Agustinus Supriyadi

Penyunting Ahli

John Tondowidjojo
Ola Rongan Wilhelmus
Armada Riyanto

Sekretaris

Aloysius Suhardi

Alamat Redaksi

STKIP Widya Yuwana

Jln. Mayjend Panjaitan. Tromolpos: 13. Telp. 0351-463208. Fax. 0351-483554
Madiun 63137 – Jawa Timur – Indonesia

Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, STKIP Widya Yuwana Madiun. Terbit 2 kali setahun (April dan Oktober).

POLITIK MENURUT FOUCAULT DALAM “THE ARCHAEOLOGY OF KNOWLEDGE” DAN RELEVANSINYA BAGI MULTIKULTURALISME INDONESIA

Agustinus Wisnu Dewantara
STKIP Widya Yuwana Madiun

Abstract

Political science, the study of politics, examines the acquisition and application of power. Related areas of study include political philosophy, which seeks a rationale for politics and an ethic of public behavior, political economy, which attempts to develop understandings of the relationships between politics and the economy and the governance of the two, and public administration, which examines the practices of governance. Many have dream up the idealization of the politics realization. Politics should not dirty! But, the fact, actually in Indonesia, politics are corruption, abuse of power, and immoral. Is that only one paradigm of politics? Indonesia must learn to Foucault to build the good governance. Specially, i hope, the discussion of this theme can give any contribution for Indonesian politic and social lives, of which to be felt decline in any ways progressively.

Keywords: *Politics, Discourse, History, Archaeology, Genealogy*

I. Pengantar

Dinamika politik di Indonesia sangat dinamis. Banyak pergumulan politis muncul salam sejarah panjang bangsa ini, bahkan semuanya terasa berbau politik di bumi Indonesia. Dewasa ini kehidupan politik di Indonesia diramaikan oleh berbagai wacana, misalnya: wacana pemberlakuan syariat agama, masyarakat madani, multikulturalisme, larangan duduk ”ngangkang”, dan lain sebagainya. Selain mengemuka dalam teks, aturan, dan lain

sebagainya, aneka wacana ini sebenarnya menampakkan keasliannya dalam tindakan konkret. Wacana liberalisme politik misalnya, mengemuka dalam aneka tindakan propaganda yang menyertainya (bahkan ada yang sukses menjelma dalam Undang-Undang Tembakau misalnya). Bagaimana realitas konkret ini diteropong dari kacamata Foucault?

Michael Foucault lahir di Poitiers, Perancis pada 15 Oktober 1926. Ia berasal dari kalangan medis, karena keluarga besar ayahnya ahli di bidang bedah. Orang tua Foucault mengharap anaknya mengikuti jejak yang sama, tetapi ia “membangkang” dan memilih belajar filsafat, sejarah, dan psikologi. Sikap ini mengisyaratkan bahwa sejak lama Foucault memang tidak menyukai sesuatu yang mapan. Ia menempuh masa studinya di *Ecole Normale Superiure* pada 1945 dan mendapat lisensi pada bidang filsafat (1948), psikologi (1950) dan psikopatologi (1952) (Macey, 1993).

Foucault menjadi dosen di Universitas Uppsala (Swedia) untuk bidang sastra dan budaya Perancis (1954-1959), serta menjadi direktur pusat kebudayaan Perancis di Polandia dan Jerman (1959). Pada tahun 1960 ia kembali pulang ke Perancis, dan berhasil memperoleh gelar “doktor negara” dengan hasil penelitiannya mengenai “Sejarah Kegilaan”.

Pada 1960-an Foucault juga mengajar universitas-universitas di Montpellier, Tunis, Clermont Ferrand dan Paris Nanterre. Pada Desember 1969 ia diangkat sebagai profesor di *College de France*. Pada 1984, Foucault meninggal dunia pada umur 57 tahun karena penyakit AIDS. Pada upacara pemakamannya, kawan karibnya Gilles Deleuze membacakan halaman terakhir dari *Arkeologi Pengetahuan*.

Sebagai akademisi, Foucault amat produktif menulis. Karyakaryanya antara lain: *Maladie et Personalite* (1954) yang membahas mengenai penyakit jiwa dan kepribadian, *Folie et Deraison: Historie de la Folie a l'age Classique* yang berisi deksripsi historis-filosofis atas kegilaan pada masa klasik (1960), *Naissance de la Clinique: Une Archeologie du Regard Medical* yang berisi sejarah arkeologi klinik/medis (1963), *Les Mots et Les Choses: Une Archeologie des Sciences Humaines* yang membahas arkeologi ilmu-ilmu manusia (1966), *L'archeologie du Savoir* yaitu bahasan arkeologi pengetahuan (1969), *L'ordre du Discurs* yang berisi susunan diskursus (1970), *Surveiller et Punir: Naissance de la Prison* yang mengulas tentang sejarah penjara (1975), sebuah rekaman historis pembunuhan abad

ke-19 yang berjudul *Moi, Pierre Riveire* (1973), serta tiga jilid dari *Historie de la Sexuality* yakni: *La Volonte de Savoir* (1976), *L'usage des Plaisirs* (1982) dan *L'souci de Soi* (1984) (Macey D, 1993)

Foucault amat dipengaruhi oleh pemikiran Nietzsche. Ia sependapat dengan Nietzsche mengenai tesis tentang kebenaran. Kebenaran bukanlah sekumpulan fakta, karena ia harus diinterpretasikan, padahal tidak ada batas mengenai bagaimana dunia harus diinterpretasikan. Jika kebenaran memiliki sandaran historis, maka ia merupakan konsekuensi dari kekuasaan (Nietzsche: *Will to Power*). Foucault kemudian memperluas cakrawala berfikir Nietzschean yang mengatakan bahwa pengetahuan adalah suatu bentuk kehendak untuk berkuasa. Gagasan ini kemudian dipikirkan kembali dan diperluas secara metodologis oleh Foucault, yaitu dengan menengahkan arkeologi dan genealogi.

Dengan mendasarkan pada karya Foucault, "*Archeology of Knowledge*" (1969), tulisan ini mencoba menjelaskan aspek-aspek politik sejarah ditemukan dalam penjelasan Foucault mengenai sejarah, wacana, dan imbasnya bagi politik kekuasaan. Pada bagian awal dalam tulisan ini akan diuraikan sedikit pengantar yang berisi mengenai sekilas mengenai sejarah singkat dari hidup dan karya Michael Foucault. Bagian kedua akan dimulai dengan sedikit paparan mengenai apa itu arkeologi yang akan membuka jalan masuk untuk mengerti *Archeology of Knowledge* yang menjadi rujukan utama. Selanjutnya penggalian aspek-aspek politik akan difokuskan pada tema sejarah dan wacana dalam *Archeology of Knowledge*. Bagian akhir adalah kesimpulan dan penutup yang sedikit berisi ulasan mengenai relevansinya bagi dunia politik Indonesia.

II. Aspek-Aspek Politik Dalam *Archeology Of Knowledge*:

2.1. Sekilas Mengenai Arkeologi

Arkeologi adalah pendekatan yang Foucault lakukan hingga 1970. Ia mendefinisikan arkeologi sebagai eksplorasi sejumlah kondisi historis nyata dan spesifik dimana berbagai pernyataan dikombinasikan dan diatur untuk mendefinisikan suatu bidang pengetahuan/obyek yang terpisah. Hal ini mensyaratkan adanya seperangkat konsep tertentu dan menghapus batas kedalaman tertentu (Chris Barker, 2005).

Arkeologi menekankan pada penggalian masa lalu di tempat tertentu. Foucault berusaha mencari jejak-jejak yang ditinggalkan

dari sebuah ritus atau monumen diskursif. Baginya setiap obyek historis yang berubah, tidak boleh ditafsirkan dalam perpektif yang sama. Konsekuensinya, diskursus senantiasa berlangsung terus-menerus. Pemahaman ini dibuktikan akan kenyataan bahwa selalu saja terjadi keterputusan historis antara bagaimana suatu obyek dikonseptualisasikan dan dipahami. Selalu saja ada jarak dalam menafsirkan suatu obyek.

2.2. Aspek-Aspek Politik

2.2.1. Sejarah

2.2.1.1. Sejarah Adalah Diskontinuitas

“For many years now historians have preferred to turn their attention to long periods, as if, beneath the shifts and changes of political events, they were trying to reveal the stable, almost indestructible system of checks and balances, the irreversible processes, the constant readjustments, the underlying tendencies that gather force, and are then suddenly reversed after centuries of continuity” (Foucault, 1972:1)

Itulah frase pertama dari *Archaeology of Knowledge* dari Michael Foucault. Tampak bahwa hal yang mau dikritisinya adalah kecenderungan dari semua pemikir dan ahli sejarah yang hendak menafsirkan “kestabilan” dan “kekonstanan” dari pembacaan suatu sejarah.

“In short, the history of thought, of knowledge, of philosophy, of literature seems to be seeking, and discovering, more and more discontinuities, whereas history itself appears to be abandoning the irruption of events in favour of stable structures.” (Foucault, 1972:7)

Tema mencolok yang dipaparkan Foucault adalah mengenai diskontinuitas dalam sejarah. Dahulu, sejarah dipaparkan sebagai hal yang linier. Sekarang, tugas sejarah justru sebaliknya, yakni memaparkan diskontinuitas. Sejarah dengan demikian harus dimengerti sebagai arkeologi, yang “menggali” peristiwa di tempat tertentu, dan memiliki kekhasannya sendiri.

Satu peristiwa di satu tempat mungkin saja memiliki maknanya sendiri tanpa harus mengertinya sebagai suatu hal yang sama persis

di tempat lain. Bahkan, bisa saja masing-masing penggalian itu memiliki keterputusan, dan tidak ada gunanya pula memaksakannya sebagai suatu momen yang berhubungan.

Sejarah versi Foucault dengan demikian bukanlah himpunan dan rekaman peristiwa-peristiwa masa lampau dan perkembangannya hingga kini. Sejarah tidak pula dilihat sebagai sesuatu yang memiliki tujuan di dalam dirinya. Sejarah di sini, adalah momen-momen, saat kebenaran dan kesalahan berkonfrontasi dalam pengetahuan manusia.

Metode yang dipakai Foucault (yakni arkeologi dan genealogi) membantu manusia untuk melihat sejarah sebagai mozaik masa lampau. Sejarah dengan demikian lebih dimengerti sebagai pelita untuk membaca peristiwa dan hidup manusia masa kini. Justru karena itulah Foucault tidak dikenal sebagai sejarawan masa lalu, namun sejarawan masa kini. Sejarah di tangan Foucault, bukanlah barang kuno yang mati, beku serta tiada berguna. Ia lebih dimengerti sebagai suatu wacana.

“In short, this book, like those that preceded it, does not belong - at least directly, or in the first instance - to the debate on structure (as opposed to genesis, history, development); it belongs to that field in which the questions of the human being, consciousness, origin, and the subject emerge, intersect, mingle, and separate off. But it would probably not be incorrect to say that the problem of structure arose there too” (Foucault 1972:7)

Karena sejarah itu adalah diskontinuitas belaka, maka bagi Foucault, tidak ada sesuatu hal pun yang obyektif. Bahkan, ilmu pengetahuan sendiri pun muncul sebagai sesuatu yang subyektif. Pengetahuan dengan demikian bisa bersifat politis. Ia bersifat politis bukan karena disalahgunakan demi kepentingan politik tertentu, melainkan karena pengetahuan dimungkinkan karena adanya relasi-relasi kuasa.

Kuasa dengan demikian tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan terutama melalui norma-norma dan regulasi. Dengan melakukan kritik terhadap ilmu pengetahuan, maka ia meruntuhkan semua kemapanan. Secara khusus, Foucault melihat kecenderungan operasionalisasi pengetahuan telah mengakibatkan ilmu-ilmu kemanusiaan (seperti antropologi) kehilangan nilai kemanusiaannya.

2.2.1.2. Sejarah Berhubungan Erat Dengan Kepentingan Politik

Hidup politik tentu amat berkait erat dengan sejarah. Di satu sisi, politik bisa menciptakan sejarah, dan di sisi lain, sejarah bisa menyumbang refleksi politis. Jika manusia pada umumnya terbiasa menafsirkan sejarah sebagai kumpulan kisah di masa lalu, atau bahkan sebagai perjalanan hidup yang linear, bagaimana dengan diskontinuitas yang ditawarkan oleh Foucault? Dan bagaimana konsekuensinya pula bagi politik?

Sejarah harus dimengerti sebagai sebuah konstruksi sosial yang di dalamnya terlibat kekerasan politik, kerakusan kuasa, dan kolaborasi antara kekuasaan dengan pengetahuan. Sejarah telah berkembang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan eksploratif dan eksploitatif. Sejarah harus digali kembali, dibongkar, dan ditemukan kepalsuan-kepalsuannya. Inilah yang dilakukan sekelompok ilmuwan dari mazhab *critical theory* dimana Foucault berdiri sebagai salah satu eksponennya yang bersemangat melakukan rekonstruksi untuk membongkar dan meredefinisi apa-apa yang sudah dianggap *established* (mapan) secara konvensional dalam komunitas ilmiah.

“These tools have enabled workers in the historical field to distinguish various sedimentary strata; linear successions, which for so long had been the object of research, have given way to discoveries in depth. From the political mobility at the surface down to the slow movements of 'material civilisation', ever more levels of analysis have been established: each has its own peculiar discontinuities and patterns; and as one descends to the deepest levels, the rhythms become broader.” (Foucault, 1972: 1)

Dalam kacamata ini, manusia (terutama bangsa Indonesia) harus selalu kritis dalam menanggapi aneka pembenaran politis yang memeralat sejarah. Kita harus pula cerdas membaca sejarah yang kerap diwariskan. Keseluruhan analisis sejarah Foucault hampir selalu merupakan pembongkaran atas realitas tersembunyi dalam sejarah, yaitu kolaborasi pengetahuan dengan kekuasaan. Pengetahuan yang mapan dalam komunitas ilmiah dan diikuti banyak pengikut ternyata tidak sesederhana kekuatan ide saja, tetapi ia melibatkan banyak aspek, faktor, aktor, dan semua ini bekerja melalui kekuasaan.

Sejarah tidak bisa diperlakukan sebagai sesuatu yang lampau. Sejarah bukanlah masa lalu, melainkan masa kini (*history of the present*). Perspektif sejarah dengan demikian harus dilihat dalam kebutuhannya bagi masa kini. Sejarah bukanlah gerak tunggal yang sekan-akan menuju satu tujuan. Gagasan ketunggalan sejarah semacam ini patut dicurigai. Mengapa? Karena sebab ternyata tidak selalu tunggal dan cenderung mengabaikan perbedaan

2.2.2. Wacana ("*Discourse*")

2.2.2.1. Sejarah Sebagai Wacana

Foucault yang antifinalis melihat adanya keterputusan (diskontinuitas) dan kontradiksi dalam sejarah. Menurut Foucault, ada pengetahuan yang muncul dari argumentasi dan karya akal budi, akan tetapi ada juga pengetahuan yang terdapat dalam hidup dan karya manusia. Jika ada karya akal (*reason*), pasti ada karya yang *unreason*. Ini semua dilihatnya sebagai kemungkinan-kemungkinan yang terarah pada pengetahuan akal. Inilah dalah satu aspek diskursus.

Foucault menggunakan istilah wacana (diskursus) dalam mengerti sejarah. Wacana bukan dimengerti sebagai sistem bahasa atau teks, melainkan aneka praktik. Semua sejarah adalah merupakan dokumen masa lalu. Dokumen inilah yang seharusnya dipelajari bukan untuk menjelaskan keakuratan historis, melainkan demi dokumen itu sendiri dan demi kebenaran.

"There was a time when archaeology, as a discipline devoted to silent monuments, inert traces, objects without context, and things left by the past, aspired to the condition of history, and attained meaning only through the restitution of a historical discourse.. " (Foucault 1972:3)

Wacana-wacana ini tersebar dalam undang-undang, aturan, peradilan, dst. Sebuah wacana tidak terdiri dari analisis hubungan antara penulis dan yang dikatakannya, melainkan pada penentuan posisi yang dapat dan harus ditempati seseorang agar menjadi subyek pernyataan itu.

"...in the final analysis, perhaps, it is not simply a concept present in the discourse of the historian, but something that the historian secretly supposes to be

present: on what basis,Making historical analysis the discourse of the continuous and making human consciousness the original subject of all historical development and all action are the two sides of the same system of thought. In this system, time is conceived in terms of totalisation and revolutions are never more than moments of consciousness.” (Foucault 1972: 3)

Setiap pemikiran atau fakta sejarah harus dimengerti sebagai kumpulan pernyataan, yang berpangkal pada titik intensi pengarang yang melahirkan pernyataan tersebut. Karena itu, dalam obyek penelitiannya, Foucault lebih suka berbicara mengenai “bentuk diskursif” daripada tentang ilmu, teori, dan sebagainya. Untuk itu yang harus dilihat adalah aturan-aturan mana yang menguasai terbentuknya obyek diskursif itu.

2.2.2.2. Politik Adalah Wacana

Wacana (*discourse*) sering dikaitkan dengan penalaran ilmiah, akan tetapi bahasa sehari-hari seperti rapat-tapat, pidato politik, dan diskusi-diskusi juga merupakan wacana. Bagi Foucault, masa silam terdiri dari aneka wacana yang berisi lautan artikulasi, pembicaraan dan penalaran manusia, samudera kata, dan kalimat serta ungkapan yang dipakai dalam berbagai bentuk, situasi, dan kesempatan yang beraneka ragam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam wacana, bahasa adalah mediator. Wacana adalah sarana yang digunakan oleh pembicara untuk menyampaikan segala sesuatu kepada pendengar. Unsur terkecil dari wacana adalah kalimat. Wacana yang diperkuat dengan tulisan disebut teks. Wacana merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan (*statement*) yang berbeda dengan ungkapan (*utterance*) maupun proposisi (*proposition*).

Yang dimaksud Foucault disini bukanlah sekedar perbincangan sehari-hari, tetapi perbincangan yang serius (*serious speech-act*). Serius tidaknya suatu perbincangan diukur berdasar intensitas keterlibatan unsur relasi kuasa dengan pengetahuan yang melahirkan wacana tersebut. Ungkapan di kalangan mahasiswa bahwa “staf KBRI di Malaysia sering memeras TKI (Tenaga Kerja Indonesia)” adalah *speech-act*, namun belum bisa dianggap serius karena ketidakmampuannya membentuk makna dan kebenaran. Namun, ketika yang berbicara adalah pejabat di Departemen Luar Negeri, hal

ini menjadi serius *speech-act*. Mengapa? Karena Departemen Luar Negeri memiliki kuasa yang selanjutnya bisa membentuk makna dan kebenaran. Demikian halnya dengan politik. Kekuasaan politik membuat apa yang dilontarkannya sebagai wacana memiliki makna politis tertentu.

III. Kesimpulan

3.1. Politik Dan Sejarah

Ide dan gagasan-gagasan Foucault bukan puing-puing yang sudah runtuh, tumbang dan mati, melainkan masih hidup memberikan inspirasi tentang perlunya bersikap kritis terhadap masa silam. Puing-puing yang ternyata memberikan ilham bahwa sejarah telah berlalu tidak melalui sebuah proses yang sederhana, bahwa sejarah harus dicurigai karena penuh dengan hal-hal yang “menyesatkan.”

Hal yang sama juga harus diterapkan dalam mengaitkan politik dan sejarah. Sejarah harus dimngerti secara kritis agar suatu bangsa bisa menarik hal yang berharga. Politik bisa saja memanipulasi jalannya sejarah, untuk itulah sejarah harus dimengerti sebagai sebuah diskontinuitas.

Pemaknaan tunggal sejarah yang kerap digunakan oleh para penguasa demi kepentingan politik tertentu sudah saatnya dikritisi. Di Indonesia, hal ini kerap terjadi, terutama di masa Orde Baru. Sejarah masa lalu Indonesia sudah seharusnya dimaknai sebagai sejarah masa sekarang (*history of the present*). Semangat Proklamasi yang dikobarkan oleh para pendiri bangsa, misalnya, sebenarnya bisa memaknai masa kini dengan segala kekayaannya daripada sekedar mengertinya sebagai sebuah peristiwa lampau belaka. Perpektif sejarah dengan demikian harus dilihat dalam kebutuhannya bagi masa kini.

Sejarah juga bukanlah gerak tunggal yang kontinyu menuju satu tujuan. Gagasan sejarah semacam ini juga patut dicurigai. Mengapa? Karena sebab tidak selalu tunggal yang cenderung mengabaikan perbedaan. Demikian pula dengan Indonesia yang kaya akan perbedaan.

3.2. Multikulturalisme, Politik, Dan Wacana

Dewasa ini kehidupan politik di Indonesia diramaikan oleh berbagai wacana, misalnya: wacana syariat Islam, masyarakat

madani, multikulturalisme, dan lain sebagainya. Selain mengemuka dalam teks, aturan, dan lain sebagainya, aneka wacana ini sebenarnya menampakkan keasliannya dalam tindakan konkret. Wacana syariat Islam misalnya, mengemuka dalam aneka tindakan propaganda yang menyertainya (bahkan ada yang sukses menjelma dalam PERDA di daerah-daerah tertentu).

Masyarakat Indonesia, dengan sumbangan Foucault ini, seharusnya sadar dan menangkap aneka wacana yang mengemuka dalam berbagai aktivitas atau diskusi politik, dan dengan cerdas pula menyikapinya.

Para pemuka politik juga kerap melontarkan wacana. Pernyataan yang keluar dari mulut seorang politikus tentu mempunyai makna yang wajib disimak. Beberapa contoh bisa diambil di sini, misalnya: larangan wanita untuk duduk "ngangkang" ketika bersepeda motor, pemaafan atas korupsi yang terjadi karena ketidaktahuan pejabat, hukuman gantung di monas ketika terbukti korupsi Hambalang, dst. Persoalannya kemudian menjadi sangat serius jika wacana ini hanya untuk membuat kebingungan publik. Di sinilah sumbangan Foucault amat terasa untuk menangkap makna yang tersembunyi di balik aneka wacana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Chris, Barker, *Culture Studies*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005)
- Finance, De Joseph, S.J., An Ethical Inquiry, Roma: 1991*
- Foucault, L'archéologie du savoir*, Paris: Gallimard, 1969 (*The Archaeology of Knowledge*, translated by A. Sheridan Smith, New York: Harper and Row, 1972)
- Gutting, Gary, *Michel Foucault's Archaeology of Scientific Reason*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989
- (ed.), *The Cambridge Companion to Foucault*, Cambridge: Cambridge University Press, second edition, 2005
- Macey, *The Lives of Michel Foucault*, (London: Hutchinson, 1993)
- Hadiwijono, Harun, Dr, *Sari Sejarah Filsafat Barat I*, Yogyakarta: Kanisius, 1980

Machiavelli, (La Brut ed.), *Il Principe*, Oxford: 1891

Suseno, Franz Magnis, *Tiga Belas Model Pendekatan Etika*,
Yogyakarta: Kanisius, 1997

Riyanto, Armada, CM, *Etika*, Malang: STFT Widya Sasana, 2000

_____, *Filsafat Politik/Kenegaraan (Filsafat Pancasila)*, Malang:
STFT Widya Sasana, 2000